

Diterbitkan Oleh :  
Fakultas Ekonomi Universitas Malikussaleh

Dewan Penasehat/Advisory Board  
Rektor Universitas Malikussaleh  
Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Malikussaleh

Ketua Penyunting/ Chief Editor  
Wahyuddin

Pengelola Penyunting/Managing Editor  
Khairil Anwar (Chief)  
Iswadi, Anwar Puteh, Ichsan, Ghazali Syamni,  
Damanhur, Kaufal Bachri, Husaini, Yulbahri

Penasehat Editorial dan Dewan Redaksi/  
Editorial Advisory and Review Board  
Prof. A. Hadi Arifin (Unimal), Jullimursyida, Ph.D (Unimal),  
Adi Afif Zakaria, Ph.D (UI), Zafri Ananto Husodo, Ph.D (UI),  
Fachruzzaman (UNIB), Erlina, Ph.D (USU), Muhammad Nasir, Ph.D (USK),  
Sofyan Syahnur, Ph.D (USK), Tafdil Husni, Ph.D (UNAND),  
Jeliteng Pribadi, MA (USK),

Sirkulasi & Secretary :  
Kusnandar Zainuddin, Fuadi, Karmila, Ismail

---

Kantor Penyunting/Editorial Office  
Kampus Bukit Indah P.O. Box. 141 Lhokseumawe Telp. (0645) 7014461 Fax. (0645) 56941  
E-mail : emabis@fe-unimal.org - Homepage: www.fe-unimal.org/jurnal/emabis

---

Jurnal E-Mabis Fakultas Ekonomi Universitas Malikussaleh diterbitkan sejak tahun 2000 sesuai dengan  
Surat Keputusan Rektor Universitas Malikussaleh nomor SK. No.34/UM/HKP/2000

---

Jurnal E-Mabis diterbitkan oleh FE Unimal bekerjasama dengan ISEI Lhokseumawe  
Dekan : Wahyuddin, Pembantu Dekan I : Khairil Anwar, Pembantu Dekan II: Iswadi,  
Pembantu Dekan III : Anwar Puteh, Pembantu Dekan IV : Ichsan

---

Jurnal E-Mabis terbit 4 kali setahun pada bulan Januari, April, Juli, dan Oktober.  
ISSN : 1412-968X. keputusan terbit 4 kali setahun mulai Edisi Vol.13 Nomor: 1, Januari 2012

## Daftar Isi

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Alokasi Belanja Daerah di Kabupaten Aceh Utara <b>Andria Zulfa</b>	219
Pengaruh Indeks Bursa Dunia terhadap Indeks Saham di Bursa Efek Indonesia <b>Chairil Akhyar, Nurhadi, Ghazali Syamni, dan Anwar Puteh</b>	235
Peluang dan Kendala Kemitraan Agribisnis Hortikultura di Aceh <b>J a m i l i a h</b>	243
Pengaruh Uang Beredar, PDB, Tingkat Bunga, dan Kurs terhadap Inflasi di Indonesia Tahun 1998-2012 <b>Khairil Anwar</b>	253
Pengaruh Jumlah Uang Beredar (M2), Nilai Tukar Rupiah (Kurs), Neraca Perdagangan dan Suku Bunga Bank Indonesia terhadap Inflasi di Indonesia Periode 2008-2013 <b>Maya Febrianty Lautania dan Evayani</b>	261
Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Aceh terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Kemiskinan <b>Muhammad Ilhamsyah Siregar dan Iqbal Mudawali</b>	273
Pengaruh Internal Konsumen terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik <i>Studi pada Konsumen Produk Merek Pond's di Kota Lhokseumawe</i> <b>Sapna Biby</b>	291
Pengaruh Budaya Organisasi dan Kemampuan Manajerial terhadap Kinerja Karyawan pada Perusahaan Jasa Kontruksi di Kota Lhokseumawe <b>S u l l a i d a</b>	305
Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah pada Baitul Mal Kota Lhokseumawe <b>Syawal Harianto dan Diana</b>	313
Pengaruh Bantuan Sarana Nelayan terhadap Peningkatan Pendapatan pada Masyarakat Pesisir Pantai Kota Lhokseumawe <i>Studi Kasus di Pesisir Pantai Meuraksa Kec. Blang Mangat</i> <b>Umaruddin Usman</b>	327

## **PENGARUH UANG BEREDAR, PDB, TINGKAT BUNGA, DAN KURS TERHADAP INFLASI DI INDONESIA TAHUN 1998-2012**

**KHAIRIL ANWAR**

*Dosen pada Fakultas Ekonomi, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe*

The study aimed to analyze the influence of the money supply, gross domestic product, interest rates and the inflation rate in Indonesia. The data used are secondary data from the years 1998-2012. The method used multiple linear regression. The results of the study found that the rate of positive and significant impact on inflation in Indonesia, negative interest rates and significant effect on inflation in Indonesia. Meanwhile, gross domestic income, and the Total Money Supply not affect inflation in Indonesia

***Keywords:*** *Inflation, money supply, GDP, interest rate, exchange rate*

## PENDAHULUAN

Inflasi merupakan dilema yang menghantui perekonomian setiap negara, lajunya yang terus meningkat memberikan hambatan pada pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih baik. Inflasi di pandang sebagai penyakit ekonomi yang mesti diberantas tuntas karna terganggunya stabilitas pasar barang dikarenakan harga input yang mahal mengakibatkan biaya produksi menjadi naik, maka *supply* menurun, harga menjadi naik, sehingga pertumbuhan ekonomi menurun dan daya beli masyarakat semakin rendah. Oleh karena itu menekan laju inflasi sering menjadi target kebijakan pemerintah. Karna inflasi dapat berubah dengan cepat menjadi Inflasi yang tinggi dan rendah maka begitu penting untuk diperhatikan mengingat dampaknya bagi perekonomian yang sangat luas.

Tekanan inflasi berdampak terhadap konsumen dan produsen serta mempengaruhi terhadap kebijakan ekonomi dalam menentukan arah pembangunan nasional. Inflasi menyebabkan nilai riil atau kemampuan daya beli konsumen menurun dan dapat menurunkan keuntungan, karena terjadi kenaikan biaya produksi bagi produsen. Apabila inflasi meningkat akan diikuti dengan kenaikan suku bunga, maka para investor tidak berani meminjam modal pada bank untuk memperluas investasi, hal ini berdampak terhadap kenaikan angka pengangguran, penurunan GDP dan pendapatan negara (Asnawi, 2007).

Tingkat suku bunga terlalu rendah, jumlah uang yang beredar di masyarakat akan bertambah karena orang akan lebih senang memutarakan uangnya pada sektor-sektor yang dinilai produktif. Suku bunga yang tinggi akan mendorong investor untuk menanamkan dananya di bank daripada menginvestasikannya pada sektor produksi atau industri yang memiliki tingkat risiko lebih besar. Sehingga dengan demikian, tingkat inflasi dapat dikendalikan melalui kebijakan tingkat suku bunga (Tajul Khalwaty, 2000).

Bank Indonesia dapat mengukur peredaran uang, nilai tukar rupiah, dan menentukan tingkat suku bunga SBI untuk mengendalikan inflasi, selain itu pemerintah juga memegang peranan penting dalam mengendalikan laju inlasi untuk itu

salah satu kebijakannya adalah mengatur pengeluaran untuk pengeluaran rutinnya (*government expenditure*) serta meningkatkan PDB. Dilain pihak sektor luar negeri juga cukup memegang peranan dalam mengendalikan inflasi diantaranya yaitu penerimaan *export*. Dengan demikian laju pertumbuhan inflasi dapat dikendalikan ditekan atau bahkan kemunculannya dapat dicegah.

## LANDASAN TEORITIS

**Inflasi** yaitu kenaikan harga secara umum terus menerus dalam periode tertentu atau proses kenaikan harga umum barang-barang secara terus menerus. Pendapat ini sudah menjadi umum dan dapat dilihat pada (Boediono, 1985; Nopirin, 1987; ; dan Hera Susanti *et al*, 1990; Hasan, 2007). Kenaikan harga barang yang terjadi hanya sekali saja, meskipun dalam persentase yang cukup besar, bukanlah merupakan inflasi (Nopirin, 1987), terjadi kelebihan permintaan (*Excess Demand*) terhadap barang-barang dalam perekonomian secara keseluruhan (Gunawan, 1991)

Inflasi menurut sifatnya digolongkan dalam tiga kategori (Nopirin, 1987), yaitu Inflasi Merayap adalah kenaikan harga terjadi secara lambat, dengan persentase yang kecil dan dalam jangka waktu yang relatif lama (di bawah 10% per tahun). Inflasi Menengah kenaikan harga yang cukup besar dan kadang-kadang berjalan dalam waktu yang relatif pendek serta mempunyai sifat akselerasi. Inflasi Tinggi kenaikan harga yang besar bisa sampai 5 atau 6 kali.

Penyebab inflasi: a) *Demand Pull Inflation*. Inflasi ini bermula dari adanya kenaikan permintaan total (*agregat demand*). Sedangkan produksi telah berada pada keadaan kesempatan kerja penuh atau hampir mendekati kesempatan kerja penuh. b) *Cost pust inflation*. ditandai dengan kenaikan harga serta turunnya produksi. Jadi inflasi yang dibarengi dengan resesi. Keadaan ini timbul dimulai dengan adanya penurunan dalam penawaran total (*agregat supply*) sebagai akibat kenaikan biaya produksi.

Level inflasi: Inflasi ringan (dibawah 10% setahun), Inflasi sedang (antara 10%-30% setahun), Inflasi berat (antara 30%-100% setahun), Hiperinflasi ( diatas 100% setahun ).

Teori-teori tentang inflasi: a) *Teori kuantitas* ini menyatakan bahwa proses inflasi itu terjadi karena 2 hal, yaitu jumlah uang beredar dan psikologi (harapan) masyarakat mengenai kenaikan harga-harga (*expectations*). Ada 2 hal penting dari teori Kuantitas ini, adalah bahwa, pertama, inflasi terjadi jika ada penambahan volume uang beredar. Kedua, inflasi oleh harapan masyarakat mengenai kenaikan harga di masa yang akan datang (Boediono, 1985). b) *Teori Keynes* ini menerangkan bahwa proses inflasi terjadi karena permintaan masyarakat akan barang-barang selalu melebihi jumlah barang-barang yang tersedia. Hal ini yang disebut juga dengan *inflationary gap*. c) *Teori Strukturalis* lebih menekankan pada faktor-faktor struktural dari perekonomian yang menyebabkan terjadinya inflasi, teori ini disebut juga teori inflasi jangka panjang karena yang dimaksud dengan faktor-faktor struktural di sini adalah faktor-faktor yang hanya bisa berubah secara gradual dan dalam jangka yang panjang.

#### Jumlah Uang Beredar (JUB)

Didalam menerangkan mengenai teori kuantitas, yang dilakukan oleh Irving Fisher digunakan persamaan aljabar yang dinamakan persamaan pertukaran. Persamaan pertukaran tersebut pada umumnya dinyatakan sebagai berikut :

$$MV = PT$$

Dimana :

$M$  = Jumlah Uang Beredar,

$V$  = Kelanjutan Peredaran Uang,

$P$  = Tingkat Harga-harga, dan

$T$  = Jumlah Barang dan Jasa yang diperjual belikan dalam suatu tahun tertentu.

Teori kuantitas uang Teori ini, yang dikembangkan oleh Irving Fisher mengatakan bahwa "pada hakikatnya berpendapat bahwa perubahan dalam jumlah uang beredar akan menimbulkan perubahan yang sama cepatnya ke atas harga-harga". Perubahan ini maksudnya jika uang yang beredar bertambah sebanyak lima persen, maka tingkat harga-harga juga akan bertambah sebanyak lima persen atau sebaliknya. Pandangan teori kuantitas yang demikian timbul sebagai akibat dari dua per-

misalan penting teori itu mengenai kenyataan yang wujud dalam perekonomian.

**Tingkat Bunga** menurut Nopirin (1996) adalah biaya yang harus di bayar oleh pemimjam atas pinjaman yang diterima dan merupakan imbalan bagi pemberi pinjaman atas investasinya. Suku bunga mempengaruhi keputusan individu terhadap pilihan membelanjakan uang lebih banyak atau menyimpan uangnya dalam bentuk tabungan. Suku bunga juga merupakan sebuah harga yang menghubungkan masa kini dengan masa depan, sebagaimana harga lainnya maka tingkat suku bunga ditentukan oleh interaksi antara permintaan dan penawaran (Suhedi, 2000).

**Produk Domestik Bruto (PDB)** didefinisikan oleh Sukirno (1994) sebagai nilai barang dan jasa dalam suatu negara yang diproduksi oleh faktor-faktor produksi milik warga negara tersebut dan warga negara asing. Sedangkan Wijaya (1997) menyatakan bahwa PDB adalah nilai uang berdasarkan harga pasar dari semua barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksi oleh suatu perekonomian dalam suatu periode waktu tertentu biasanya satu tahun. Secara umum PDB dapat diartikan sebagai nilai akhir barang-barang dan jasa yang diproduksi di dalam suatu negara selama periode tertentu (biasanya satu tahun).

Menurut pendekatan produksi, produk domestik bruto (PDB) adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu Negara dalam jangka waktu setahun (Dumairy, 1990).

**Nilai Tukar Rupiah** atau disebut juga kurs Rupiah adalah perbandingan nilai atau harga mata uang Rupiah dengan mata uang lain. Perdagangan antar negara dimana masing-masing negara mempunyai alat tukarnya sendiri mengharuskan adanya angka perbandingan nilai suatu mata uang dengan mata uang lainnya, yang disebut kurs valuta asing atau kurs (Salvatore, 1998).

#### Hipotesis

1. Jumlah Uang Beredar berpengaruh positif dan signifikan terhadap inflasi di Indonesia periode 1998-2012

2. Produk Domestik Bruto berpengaruh positif dan signifikan terhadap inflasi di Indonesia periode 1998-2012
3. Tingkat bunga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap inflasi di Indonesia periode 1998-2012
4. Kurs berpengaruh positif dan signifikan terhadap inflasi di Indonesia periode 1998-2012

### METODE PENELITIAN

Metode analisis data di gunakan model regresi berganda, sebagai berikut:

$$INF = f(PDB, JUB, ECR, SBD)$$

Dimana;

*INF* = Inflasi

*PDB* = Produk Domestik Bruto

*JUB* = Jumlah Uang Beredar

*ECR* = Kurs

*SBD* = Suku Bunga Deposito

Untuk tujuan kajian, spesifikasi model tentang faktor penyebab inflasi di Indonesia diestimasi dalam bentuk log-linear sebagai berikut;

$$INF = \beta_0 \ln PDB + \beta_1 \ln JUB + \beta_2 ECR + \beta_3 SBD + \epsilon_t$$

#### Uji Persyaratan Asumsi Klasik

Uji autokorelasi adalah untuk menguji dalam model regresi linear adakah hubungan (korelasi) antara kesalahan pengganggu pada periode *t* dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya. Masalah autokorelasi dimaksudkan disini adalah untuk menguji deretan data menurut waktu (deret waktu) apakah timbul autokorelasi dikarenakan residual (kesalahan pengganggu) bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Selanjutnya, untuk mendeteksi autokorelasi dilakukan melalui uji Durbin-Watson dengan program SPSS yang dapat menyediakan fasilitas untuk uji autokorelasi tersebut. (Imam Ghozali, 2010).

Uji Multikolinieritas adalah keadaan, dimana terdapat hubungan yang linear diantara variabel-variabel bebas. Jika variabel bebas tersebut mem-

punyai hubungan yang perfect dengan variabel bebas lainnya. Gujarati (1997) mengemukakan multikolinieritas adalah adanya hubungan linear yang sempurna atau pasti, diantara beberapa atau semua variabel.

Nachrowi dan Usman (2002) mengemukakan multikolinieritas menimbulkan beberapa akibat; (1). Variasi besar (dari taksiran OLS), (2). Interval kepercayaan lebar. (3) Uji-t (t rasio) tidak signifikan. (4)  $R^2$  tinggi, tetapi tidak banyak variabel yang signifikan dari uji t. (5). Terkadang taksiran koefisien yang didapat akan mempunyai nilai yang tidak sesuai dengan substansial, sehingga dapat menyesatkan interpretasi.

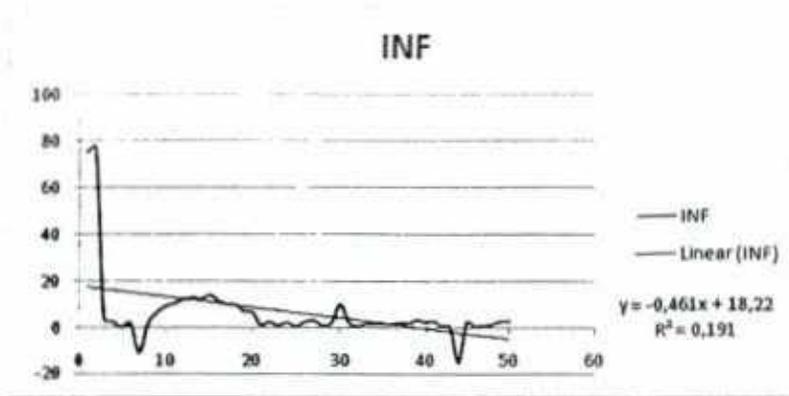
Ghozali (2010), mengemukakan langkah-langkah untuk mengatasi multikolinieritas, yaitu; (a) menggabungkan data (pooling data), (b) keluarkan satu atau lebih variabel independen yang mempunyai korelasi tinggi dari model dan identifikasikan variabel independen lainnya untuk membantu prediksi, (c) transformasi variabel dengan cara mengurangi hubungan linear diantara variabel independen, (d) gunakan model dengan variabel independen yang mempunyai korelasi tinggi hanya untuk prediksi.

### HASIL PENELITIAN

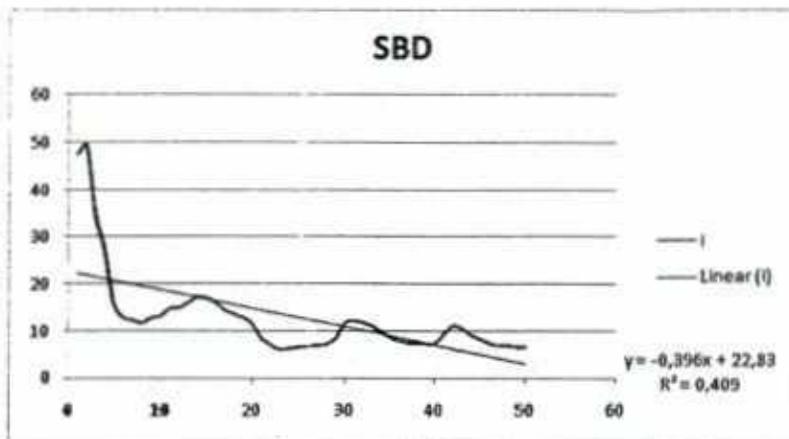
Hasil pengolahan data berupa informasi untuk mengetahui apakah Inflasi (INF) dipengaruhi oleh faktor Produk Domestik Bruto (PDB), Jumlah Uang Beredar (JUB), Nilai tukar Dollar terhadap rupiah (ECR) dan Suku Bunga Deposito (SBD).

Pada tahun 1998 kuartal empat tekanan inflasi sangat kuat yaitu 77,63 disebabkan terjadinya krisis ekonomi. Dan pada tahun 2000 tekanan inflasi turun drastis kuartal satu yaitu -11, oleh sebab terjadi apresiasi nilai rupiah dari 10.700 ke 7.100 terhadap dollar serta meningkatnya anggaran belanja pemerintah akibatnya kemampuan pemerintah untuk berekspansi investasi di dalam negeri semakin meningkat. Dengan kondisi tingkat pertumbuhan produksi domestik yang relatif lebih cepat, peningkatan permintaan (investasi) pemerintah menyebabkan terjadi realokasi sumberdaya dari masyarakat ke pemerintah.

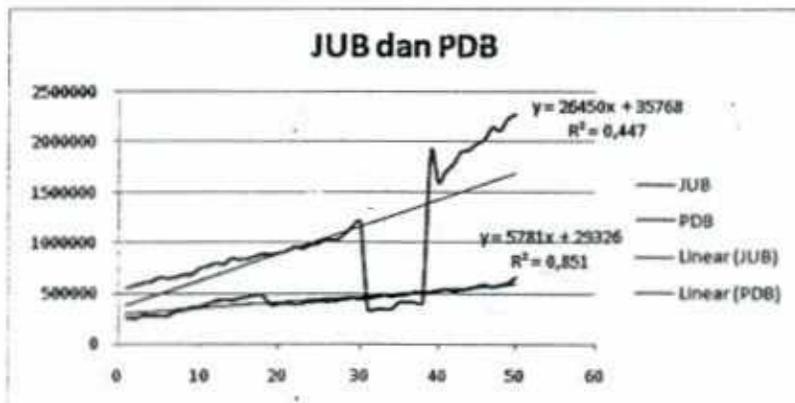
Oleh sebab upaya pemerintah dengan peranan Bank Indonesia menaikkan suku bunga sebesar



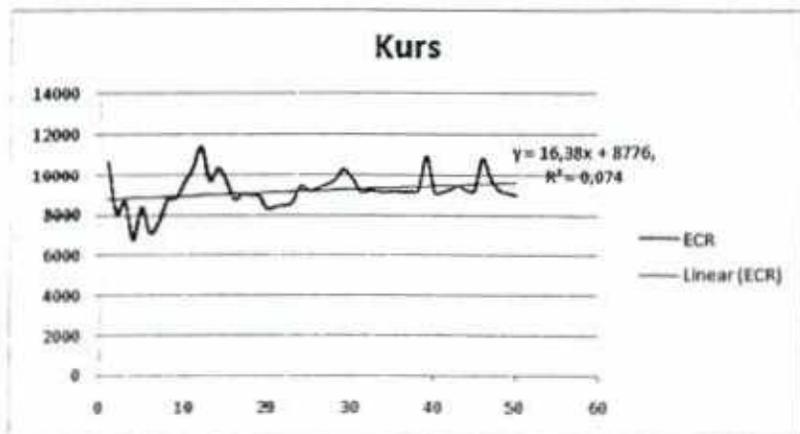
Gambar 1. Grafik Laju Inflasi



Gambar 2. Grafik Tingkat Bunga



Gambar 3. Grafik Jumlah Uang Beredar dan Produk Domestik Bruto



Gambar 4. Grafik Kurs

49,23 % untuk mengurangi peredaran uang yang sangat tinggi pada tahun 1998 yang menyebabkan inflasi tinggi. Malah dengan relatif tingginya tingkat bunga menyebabkan biaya produksi dan investasi yang dibiayai kredit perbankan akan tinggi juga, akibatnya terjadi tekanan inflasi. Akhirnya, relasi antara tingkat suku bunga dengan inflasi ini menjadi *interest rate-price spiral*. Namun pada sisi lain nilai tukar rupiah disamping dapat mengakibatkan tekanan inflasi yang kuat, khususnya *imported inflation*.

Pemerintah yang lebih banyak menggunakan kebijakan moneternya dalam mengupayakan mengendalikan tingkat harga umum. Peredaran uang pada tahun 2001 sampai tahun 2004 kuartal empat terus mengalami peningkatan secara signifikan akibatnya terjadi kenaikan inflasi pada tahun 2005 kuartal empat sebesar 10,5%. Dengan ditingkatkan suku bunga pada tahun yang sama sebesar 11,75 tingkat peredaran uang mengalami penurunan kembali pada tahun 2006 dan tingkat inflasi terjadi penurunan.

Apabila tingkat suku bunga (deposito) perbankan sudah terlalu tinggi, sehingga dana produktif (dana untuk berproduksi atau berusaha) yang ada di masyarakat ikut terserap ke perbankan, maka akan dapat menyebabkan timbulnya stagnasi atau bahkan penurunan produk domestik bruto, terjadi pada tahun 2006.

Terjadi depresiasi rupiah yang cukup tajam terhadap mata uang asing pada tahun 2001, 2008, 2009, maka akan menyebabkan bertambah beratnya beban biaya yang harus ditanggung oleh produsen, baik itu untuk pembayaran bahan baku

dan barang perantara ataupun beban hutang luar negeri akibat ekspansi usaha yang telah dilakukan. Hal ini menyebabkan harga jual output di dalam negeri (khususnya untuk industri substitusi impor) akan meningkat tajam, sehingga potensial meningkatkan derajat inflasi di dalam negeri.

## PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil estimasi data seperti terlihat pada Tabel 1, dilakukanlah Uji parsial (uji t) yang merupakan pengujian statistik untuk melihat pengaruh setiap variabel independen, yang terdiri dari variabel Pendapatan Domestik Bruto (PDB), Jumlah Uang Beredar (JUB), Echange Rate (ECR) dan Suku Bunga Deposito (SBD) terhadap variabel dependen inflasi (INF). Pendapatan Domestik Bruto (PDB) tidak berpengaruh terhadap inflasi, karena  $t_{hitung,0,01} = 0,538 < t_{tabel,0,01} = 2,423$ , dimana  $H_0$  yang diterima dan di tolak hipotesis alternatif ( $H_1$ ). Selanjutnya Variabel jumlah uang beredar (JUB) tidak berpengaruh terhadap inflasi, karena  $t_{hitung,0,01} = 0,138 < t_{tabel,0,01} = 2,423$ , dimana menerima hipotesis Null ( $H_0$ ) dan menolak hipotesis  $H_1$ . Kurs atau exchange rate (ECR) berpengaruh secara signifikan secara positif terhadap inflasi, karena  $t_{hitung,0,01} = 2,458 > t_{tabel,0,05} = -2,0595$ , dimana hipotesis diterima. Suku bunga deposito (SBD) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap inflasi (INF), karena  $t_{hitung,0,01} = 8,482 > t_{tabel,0,05} = 2,0595$ , dimana hipotesis diterima.

Uji simultan (Uji F) adalah uji statistik yang menggambarkan dari hasil regresi, apakah variabel independent yang terdiri dari Produk Domes-

Tabel 1  
Hasil Regresi Linear Berganda

Nama Variabel		$t_{hitung}$	$t_{tabel}$	Sig
Konstanta	-398.263	-3,335	2.0595	0.002
JUB	0.867	0.138	2.0595	0.891
ECR	87.493	2.458**	2.0595	0.018
PDB	12.539	0.538	2.0595	0.593
SBD	-1.774	8.482***	2.0595	0.000
Koef. Korelasi (R)	0.967		Predictors: (Constant), JUB, ECR, PDB dan SBD	
Koef. Determinasi ( $R^2$ )	0.752		Dependent Variabel : Inflasi (INF)	
R Adjusted Square	0.730		F	34.066

\*\*\* signifikan pada 1%.

\*\* signifikan pada 5%

tingkat Bruto (PDB), Jumlah Uang Beredar (JUB), Kurs atau Echange rate (ECR) dan suku bunga deposito (SBD) secara bersama-sama mempengaruhi inflasi (INF) atau variabel dependen.

Berdasarkan hasil estimasi data pada Tabel 1, didapati nilai  $F_{hitung} = 34,066 > F_{tabel,0,05} = 5,5097$  ini berarti variabel jumlah uang beredar (JUB), kurs (ECR), Produk Domestik Bruto (PDB) dan suku bunga deposito (SBD) secara bersama-sama menerangkan atau mempengaruhi terhadap inflasi di Indonesia, sedangkan selebihnya dipengaruhi oleh variabel lain diluar model.

### KESIMPULAN

Kurs berpengaruh positif dan signifikan terhadap inflasi, tingkat Suku Bunga mempunyai pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap inflasi, jumlah Uang Beredar, tidak berpengaruh terhadap inflasi di Indonesia, Pendapatan Domestik Bruto tidak berpengaruh terhadap inflasi di Indonesia.

### SARAN

Berdasarkan hasil penelitian membuktikan bahwa kenaikan jumlah uang beredar cenderung tidak menaikkan Inflasi. Untuk mengurangi dan menambahkan uang beredar dengan menentukan

tingkat suku bunga, pemerintah harus lebih mengontrol volume uang yang beredar sesuai dengan kebutuhannya di masyarakat. Dengan naiknya tingkat suku bunga merupakan implikasi dari tingginya inflasi, karena jika inflasi tinggi maka akan diikuti pula oleh meningkatnya kebijakan terhadap sumber-sumber pembiayaan yang menyebabkan naiknya tingkat suku bunga Bank Indonesia. Untuk menekan inflasi maka kebijakan yang diambil adalah menstabilkan tingkat suku bunga, sejalan dengan kondisi makro ekonomi Indonesia yang terjadi saat ini.

Untuk meningkatkan PDB sehingga inflasi menjadi rendah kebijakan yang diambil dengan efisiensi alokasi anggaran dan memberikan bobot yang lebih besar pada pengeluaran pembangunan. Berdasarkan penelitian ini maka untuk menjaga kestabilan harga di dalam negeri maka otoritas moneter melalui kebijakannya diharapkan dapat menjaga kestabilan rupiah terhadap dollar dalam batas wajar dan aman.

## REFERENSI

- Asnawi (2008), *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Inflasi di Indonesia: Studi Empiris Dengan Pendekatan VECM*, Jurnal Mantek- ASM Tanah Rencong: Lhokseumawe.
- Badan Pusat Statistik, *Statistik Indonesia*, Lhokseumawe, Beberapa Edisi.
- Bank Indonesia, *Laporan Tahunan BI*, Lhokseumawe, Beberapa Edisi.
- Boediono, (1985), *Ekonomi Moneter*, edisi 3, BPFE : Yogyakarta.
- Dumairy (1990), *Matematika Ekonomi*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Endri, (2005), *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Inflasi di Indonesia*, ABFI Institute PERBANAS Jakarta.
- Gujarati, Damodar (1997), *Ekonometrika Dasar*, Alih Bahasa Sumarno Zain, Erlangga, Jakarta
- Imam Ghozali (2005), *Analisis Multivariat Dengan Program SPSS*, Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Mankiw, N. Gregory. (2007). *Makro Ekonomi*. Edisi Keenam. Penerbit Erlangga. Jakarta, Indonesia.
- Nachrowi Djalal Nachrowi & Hardius Usman (2002), *Penggunaan Teknik Ekonometrika Pendekatan Populer & Praktis dilengkapi tehnik Analisis & Pengolahan Data Dengan Menggunakan Paket Program SPSS*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Nopirin, (1987), *Ekonomi Moneter*, edisi 1, BPFE : Yogyakarta.
- Salvatore, (1998), *Ekonomi Internasional*, Erlangga : Jakarta.
- Sriyana, Jaka, (2001), *Dampak Ekspansi Fiskal Terhadap Inflasi : Studi Empiris Dengan Pendekatan ECM*, JEP, vol 6, no 2, 203-212. [www.jurnal-ekonomi.org](http://www.jurnal-ekonomi.org).
- Sukimo, Sadono, (2004), *Makro Ekonomi Teori Pengantar*, edisi 3, PT Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Tajul Khalwaty. (2000). *Inflasi dan Solusinya*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama
- Wahjuanto Mamik (2010), *Beberapa faktor yang mempengaruhi inflasi di Indonesia* [www.jurnal-ekonomi.org](http://www.jurnal-ekonomi.org).
- <http://amriamir.wordpress.com/2009/12/02/hubungan-inflasi-dan-suku-bunga/>

mencegah kesengsaraan sosial, (3) Mencegah penindasan ekonomi dan distribusi kekayaan yang tidak merata, (4) Melindungi kepentingan ekonomi lemah, (5) Membangun organisasi yang berprinsip syarikat, sehingga terjadi proses yang kuat untuk membantu yang lemah, (6) Pembagian kerja atau spesialisasi berdasarkan saling ketergantungan, serta pertukaran barang dan jasa karena tidak mungkin berdiri sendiri.

Penerapan pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil terdiri dari pembiayaan mudharabah maupun pembiayaan musyarakah pada Bank Syariah menimbulkan dampak antara lain dalam hal terjadi kerugian dari nasabah, maka asset yang dimiliki oleh nasabah dijadikan jaminan untuk mengembalikan pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah terhadap nasabah. Pembiayaan dengan sistem bagi hasil merupakan salah satu implementasi, konsep bank syariah. Sistem bagi hasil ini telah dilaksanakan oleh Bank Syariah dalam bentuk pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Jika dibandingkan dengan perjanjian kredit pada bank konvensional, pembiayaan ini memiliki persamaan dan perbedaan. Perbedaan yang substansial adalah dari segi konstruksi hukumnya dan kontra prestasi. Selain itu hal yang cukup signifikan adalah akad atau perjanjian pembiayaan klausul-klausul. Mencerminkan nilai-nilai keadilan, tidak terdapat klausul-klausul yang merugikan mitra usaha (mudharib).

Pentingnya peran pembiayaan syariah terhadap subsektor peternakan adalah sebagai berikut:

1. Karakteristik pembiayaan syariah sesuai dengan kondisi bisnis peternakan. Dalam dunia bisnis fluktuasi perolehan pendapatan merupakan hal wajar. Skim pembiayaan syariah (terutama bagi hasil), sangat sesuai dengan karakteristik bisnis peternakan sehingga lebih memberikan rasa keadilan karena untung dan rugi dibagi bersama-sama. Artinya peternak dan pemilik modal bersama-sama bertanggung jawab terhadap jalannya usaha. Berbeda dengan kredit konvensional, peternak bertanggung jawab penuh dalam menanggung resiko usaha.
2. Produk pembiayaan syariah cukup beragam. Luasnya cakupan usaha dan komoditas peternakan telah diantisipasi dengan produk pembiayaan syariah yang juga beragam. Hal ini memungkinkan nasabah untuk memilih jenis produk pembiayaan syariah sesuai dengan kondisi dan karakteristik usaha.
3. Tingkat kepatuhan peternak. Usaha peternakan saat ini masih digeluti oleh sebagian besar peternak, dan umumnya mereka menghormati aturan keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Adanya skim pembiayaan yang sesuai dengan ajaran agama diharapkan secara emosional akan memudahkan peternak dalam menerima sistem pembiayaan syariah. Selain itu prinsip-prinsip yang dijalankan di lembaga pembiayaan syariah mengandung tatanan nilai yang bersifat universal dan tidak eksklusif. Nilai-nilai seperti keadilan dan perlakuan yang sama dalam meraih kesempatan berusaha diharapkan dapat juga diterima kalangan non muslim.
4. Komitmen Bank Syariah untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Pembiayaan selama ini dilakukan oleh bank/lembaga syariah, alokasi pembiayaan terbesar diperuntukkan untuk UKM. Komitmen ini merupakan peluang besar untuk subsektor peternakan yang mayoritas berskala usaha kecil dan menengah.
5. Usaha subsektor peternakan merupakan bisnis riil. Hal ini sesuai dengan prinsip pembiayaan syariah yang menitikberatkan pada pembiayaan sektor riil dan justru melarang pembiayaan pada sektor yang spekulatif.

Peran pengambil kebijakan sangat berpengaruh dalam menerapkan maupun mendukung pembiayaan syariah pada subsektor peternakan. Terutama menteri-menteri dan lembaga pemerintahan baik pusat maupun daerah yang memiliki

wewenang dalam menentukan kebijakan ekonomi. Keberpihakan pemerintah terhadap ekonomi syariah sangat penting, karena hal ini bukan semata-mata menyangkut mayoritas umat Islam di Indonesia maupun di provinsi Aceh dan berkaitan dengan masalah stabilitas ekonomi nasional ataupun daerah. Bank Syariah adalah tulang punggung berkembang atau tidaknya ekonomi syariah. Oleh karena itu kegagalan bank syariah dapat dibaca sebagai kegagalan ekonomi syariah. Ada sejumlah alasan mengapa institusi keuangan konvensional yang ada sekarang ini mulai melirik sistem syariah, antara lain pasar yang potensial karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan kesadaran mereka untuk berperilaku bisnis secara Islami. Potensi ini menjadi modal bagi perkembangan ekonomi umat di masa datang. Selain itu, terbukti bahwa institusi ekonomi yang menerapkan prinsip syariah, mampu bertahan di tengah krisis ekonomi yang melanda Indonesia.

Sistem ekonomi syariah akan membawa dampak lahirnya pelaku-pelaku bisnis yang bukan hanya berjiwa wirausaha tapi juga berperilaku Islami, bersikap jujur, menetapkan upah yang adil dan menjaga keharmonisan hubungan antara atasan dan bawahan. Dapat dibayangkan kesejahteraan yang dapat dinikmati umat jika penerapan ekonomi syariah ini sudah mencakup ke segala aktivitas ekonomi di Indonesia dan khususnya di provinsi Aceh. Peluang penerapan ekonomi syariah masih terbuka luas.

### **Kesimpulan**

Untuk mewujudkan kemandirian Provinsi Aceh, pemerintah daerah tingkat provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten/kota harus mampu memilih sektor-sektor mana yang dapat dijadikan unggulan bagi daerahnya yang tentunya dapat berdampak positif bagi pembangunan wilayah, khususnya peningkatan pendapatan daerah dan penyerapan tenaga kerja.

Peran pemerintah provinsi ataupun pemerintah daerah sebagai institusi publik harus dapat mengayomi dan melayani masyarakat luas khususnya yang bergerak di subsektor peternakan untuk menyediakan produk peternakan secara berkelanjutan dan mewujudkan kebersamaan semua komponen yang bergerak di subsektor peternakan dalam rangka membangun industri peternakan yang tangguh. Pemerintah daerah akan menjadi fasilitator yang baik dalam mewujudkan kemandirian dan kebersamaan apabila semua kebijakannya berpihak kepada kepentingan peternak khususnya dan kepentingan daerah pada umumnya. Demikian pula sebaliknya, di mana industri peternakan akan hancur apabila kebijakan yang ditelurkannya lebih dilandasi pada kepentingan-kepentingan sesaat.

Pembiayaan syariah sangat penting untuk mengembangkan subsektor peternakan Aceh. Peran pengambil kebijakan sangat berpengaruh dalam menerapkan maupun mendukung pembiayaan syariah pada subsektor peternakan. Keberpihakan pemerintah terhadap ekonomi syariah dapat mengembangkan ekonomi di masa datang, sehingga peningkatan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah, bahkan kesejahteraan rakyat dapat tercapai.

## Referensi

- [1] Sukirno, Sadono, *Ekonomi Pembangunan*, Edisi Kedua, Kencana, Jakarta, 2007.
- [2] Arifin, Bustanul, *Analisis Ekonomi Pertanian Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2004.
- [3] Chapra, Umar. *What is Islamic Economics?* IDB. IRTI. 2001.
- [4] Usmani, M. Taqi, *An Introduction to Islamic Finance*. Maktaba Ma'ariful Qur'an, Karaci, 2004.
- [5] Tahir, Sayyid. *Lecture Course of Islamic Banking Theory and Practice*. International Islamic University Islamabad. 2006.
- [6] Dinas Peternakan Provinsi Aceh, *Populasi Ternak Provinsi Aceh*, 2009
- [7] Sukarmadji, *Beberapa Konsep Pemikiran Pengembangan Peran Perbankan Syariah*, Seminar Nasional Ekonomi Syariah UNPAD, Maret 2009.
- [7] Muhammad Hidayat, *Pengantar Ekonomi Syariah*, Zikrul, Jakarta, 2010.